



**KEMENTERIAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL/
BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL**

PEMBAHASAN KERANGKA PENDANAAN *BILATERAL MEETING*

**KEDEPUTIAN BIDANG PENDANAAN PEMBANGUNAN
KEMENTERIAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL/
BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL**

22 Februari 2016

UU 17/2003 tentang Keuangan Negara

- **Pasal 12 ayat 2**
 - Penyusunan Rancangan APBN berpedoman kepada rencana kerja Pemerintah dalam rangka mewujudkan tercapainya tujuan bernegara.

UU 25 /2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional

- **Pasal 4 ayat 3**
 - RKP merupakan penjabaran dari RPJM Nasional, memuat prioritas pembangunan, rancangan kerangka ekonomi makro yang mencakup gambaran perekonomian secara menyeluruh termasuk arah kebijakan fiskal, serta program Kementerian/Lembaga, lintas Kementerian/Lembaga, kewilayahan dalam bentuk kerangka regulasi dan kerangka pendanaan yang bersifat indikatif.
- **Pasal 6 ayat 1 dan 2**
 - Renstra-KL memuat visi, misi, tujuan, strategi, kebijakan, program, dan kegiatan pembangunan sesuai dengan tugas dan fungsi Kementerian/Lembaga yang disusun dengan berpedoman pada RPJM Nasional dan bersifat indikatif.
 - Renja-KL disusun dengan berpedoman pada Renstra-KL dan mengacu pada prioritas pembangunan Nasional dan pagu indikatif, serta memuat kebijakan, program, dan kegiatan pembangunan baik yang dilaksanakan langsung oleh Pemerintah maupun yang ditempuh dengan mendorong partisipasi masyarakat.
- **Pasal 25 ayat 1**
 - RKP menjadi pedoman penyusunan RAPBN

BILATERAL MEETING

- Pertemuan Bappenas – K/L dengan tujuan menuangkan hasil kesepakatan *Multilateral Meeting* dalam bentuk penugasan dan pagu masing-masing K/L
- Fokus pembahasan pada prioritas nasional, untuk Program/Kegiatan lainnya menggunakan koridor Norma dan Standar Perencanaan
- Output :
 - Penajaman penugasan Kegiatan Prioritas Nasional (target dan pendanaannya)
 - Verifikasi kegiatan diluar prioritas
 - Hal – hal yang penting dan mendesak untuk didanai (contoh: *Asian Games*, 100 prioritas Presiden dan lainnya)

MATRIKS PROGRAM PRIORITAS, KEGIATAN PRIORITAS, SERTA PROGRAM DAN KEGIATAN KEMENTERIAN/LEMBAGA (FORM B) (1/4)

PRIORITAS NASIONAL: KEDAULATAN PANGAN

Program Prioritas	Kegiatan Prioritas	Kementerian / Lembaga	Program	Kegiatan	Sasaran	Indikator	Lokasi	Target 2017	Alokasi (Juta Rp.)	Ket
Peningkatan Produksi Padi dan Pangan Lain	Pemanfaatan Lahan Tidur (Optimasi Lahan)	Kementerian Pertanian	Program Penyediaan dan Pengembangan Prasarana dan Sarana Pertanian	Perluasan dan Perlindungan Lahan Pertanian	Memanfaatkan 10.000 ha lahan tidur untuk pertanian. Untuk padi = Ha Untuk Jagung = Ha Lainnya =Ha	Termanfaatkannya 10.000 ha bekas lahan tidur untuk pertanian.	Kabupaten A, B, C, D Koordinat :	10.000 ha		
Program Prioritas	Kegiatan Prioritas				Penyederhanaan Nomenklatur					
Peningkatan Produksi Padi dan Pangan Lain	Pencetakan Sawah Baru	Kementerian Pertanian	Program Penyediaan dan Pengembangan Prasarana dan Sarana Pertanian	Perluasan dan Perlindungan Lahan Pertanian	Tercetaknya 266.700 Ha Sawah Baru	Tercetaknya 266,700 Ha Sawah Baru, yang dibuktikan dengan lokasi yang jelas, ada dukungan irigasi sehingga Sawah tersebut dapat dimanfaatkan.	Kabupaten A, B,C,D Koordinat : A B..... C..... D.....	266.700 Ha		
		"Rumah dari kebijakan" (Hanya muncul di dokumen terkait penganggaran)			Menjadi alat ukur kinerja oleh Presiden/Kabinet, untuk itu perlu sasaran yang konkret					

MATRIKS PROGRAM PRIORITAS, KEGIATAN PRIORITAS, SERTA PROGRAM DAN KEGIATAN KEMENTERIAN/LEMBAGA (FORM B) (2/4)

PRIORITAS NASIONAL: KEDAULATAN PANGAN

Program Prioritas	Kegiatan Prioritas	Kementerian / Lembaga	Program	Kegiatan	Sasaran	Indikator	Lokasi	Target 2017	Alokasi (Juta Rp.)	Ket
Peningkatan Produksi Padi dan Pangan Lain	Pencetakan Sawah Baru	Kementerian Pertanian	Program Penyediaan dan Pengembangan Prasarana dan Sarana Pertanian	Perluasan dan Perlindungan Lahan Pertanian	Terlindunginya x 000 Ha Lahan Irigasi Teknis dari Konversi untuk Penggunaan lain.	Terlindunginya x 000 Ha Lahan Irigasi Teknis dari Konversi untuk Penggunaan lain. Terbitnya x buah Perda yang melindungi Lahan Irigasi Teknis	Kabupaten A, B, C, D Koordinat :	10.000 ha		
Program Prioritas	Kegiatan Prioritas				Penyederhanaan Nomenklatur					
Peningkatan Produksi Padi dan Pangan Lain	Penyaluran bantuan alat dan mesin pertanian	Kementerian Pertanian	Program Penyediaan dan Pengembangan Prasarana dan Sarana Pertanian	Pengelolaan Sistem Penyediaan dan Pengawasan Alat Mesin Pertanian	Memberikan subsidi x % atas harga Alsintan, sehingga Petani/Kelompok Tani membeli Alsintan, menggunakan dan merawatnya.	Tersalurinya 7.300 Unit Alsintan kepada Petani atau Kelompok Tani dengan subsidi x % dari harga	Kab A ...Unit; Kab B...Unit ; Kab. C....Unit	7.300 unit		
		"Rumah dari kebijakan" (Hanya muncul di dokumen terkait penganggaran)			Menjadi alat ukur kinerja oleh Presiden/Kabinet, untuk itu perlu sasaran yang konkret					

MATRIKS PROGRAM PRIORITAS, KEGIATAN PRIORITAS, SERTA PROGRAM DAN KEGIATAN KEMENTERIAN/LEMBAGA (FORM B) (3/4)

PRIORITAS NASIONAL: KEDAULATAN PANGAN

Program Prioritas	Kegiatan Prioritas	Kementerian / Lembaga	Program	Kegiatan	Sasaran	Indikator	Lokasi	Target 2017	Alokasi (Juta Rp.)	Ket
Peningkatan Produksi Padi dan Pangan Lain	Penyaluran bantuan alat dan mesin pertanian	Kementerian Pertanian	Program Penyediaan dan Pengembangan Prasarana dan Sarana Pertanian	Pengelolaan Sistem Penyediaan dan Pengawasan Alat Mesin Pertanian	Terbangunnya sistem Pengelolaan dan Pemeliharaan Alsintan x 000 unit yang sudah disalurkan kpd Petani/Kel.Tani sehingga Alsintan tsb bermanfaat yang berkesinambungan	Terbangunnya Sistem Pengelolaan dan Pemeliharaan x 000 unit Alsintan ex pemberian Pemerintah (koperasi, Kel. Tani, Bengkel Bersama, dan lainnya)	Kabupaten A, B, C, D	x 000 unit		
Program Prioritas	Kegiatan Prioritas				Penyederhanaan Nomenklatur					
Peningkatan Produksi Padi dan Pangan Lain	Penyaluran subsidi benih dan pupuk	Kementerian Pertanian	Program Peningkatan Produksi, Produktivitas dan Mutu Hasil Tanaman Pangan	Pengelolaan Sistem Penyediaan Benih Tanaman Pangan	Tersalurkannya ... (00) Ton Benih Padi Unggul	Tersalurkannya ... (00) Ton Benih Padi Unggul menjelang musim tanam	Seluruh Indonesia dengan pembagian perlokasi sbb:	... 00) ton benih padi		
			"Rumah dari kebijakan" (Hanya muncul di dokumen terkait penganggaran)		Menjadi alat ukur kinerja oleh Presiden/Kabinet, untuk itu perlu sasaran yang konkret					

MATRIKS PROGRAM PRIORITAS, KEGIATAN PRIORITAS, SERTA PROGRAM DAN KEGIATAN KEMENTERIAN/LEMBAGA (FORM B) (4/4)

PRIORITAS NASIONAL: KEDAULATAN PANGAN

Program Prioritas	Kegiatan Prioritas	Kementerian / Lembaga	Program	Kegiatan	Sasaran	Indikator	Lokasi	Target 2017	Alokasi (Juta Rp.)	Ket
Peningkatan Produksi Padi dan Pangan Lain	Penyaluran subsidi benih dan pupuk	Kementerian Pertanian	Program Peningkatan Produksi, Produktivitas dan Mutu Hasil Tanaman Pangan	Fasilitasi Pupuk dan Pestisida	Tersalurnya 9,55 juta Ton Pupuk Bersubsidi	Tersalurnya 9,55 juta Ton Pupuk Bersubsidi yang terdiri dari : Ton Pupuk UreaTon Pupuk TSP Ton Pupuk ZATon Pupuk Organik	Seluruh Indonesia dengan pembagian perlokasi sbb:	9,55 Ton Pupuk		
Program Prioritas	Kegiatan Prioritas	"Rumah dari kebijakan" (Hanya muncul di dokumen terkait penganggaran)		Penyederhanaan Nomenklatur						
Peningkatan Produksi Padi dan Pangan Lain	Rehabilitasi Jaringan Irigasi; Pembangunan Waduk; Pembangunan embung	Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat	Program Pengelolaan Sumber Daya Air	Pengelolaan Waduk Embung, Situ Serta Bangunan Penampung Air Lainnya	... buah Waduk yang dibangun dan ... buah Waduk yang terpelihara	Terbangunnya ... buah Waduk dan terpeliharanya ... buah Waduk	Pembangunan Waduk baru, dengan lokasi sbb: Pemeliharaan Waduk eksisting, dengan lokasi sbb: buah embung baru buah embung dipelihara		
Peningkatan Produksi Padi dan Pangan Lain	Rehabilitasi Jaringan Irigasi; Pembangunan Waduk; Pembangunan embung	Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat	Program Pengelolaan Sumber Daya Air	Pengelolaan Waduk Embung, Situ Serta Bangunan Penampung Air Lainnya	Terbangun dan terpeliharanya ... buah Embung	Terbangunnya ... buah Embung dan terpeliharanya ... buah Embung	Pembangunan Embung dengan lokasi sbb: ... Pemeliharaan Embung, dengan lokasi sbb:.....			

URUTAN KERJA PEMBAHASAN KEGIATAN PRIORITAS

1. VERIFIKASI NORMA DAN STANDAR

NORMA
1) Pembangunan bersifat holistik komprehensif memperhatikan seluruh dimensi terkait;
2) Pembangunan untuk manusia dan masyarakat, harus memberdayakan masyarakat untuk menjadi mandiri dan tidak justru menyebabkan menjadi masyarakat yang lemah (<i>entitled society</i>);
3) Pembangunan tidak menciptakan ketimpangan yang makin melebar;
4) Pembangunan tidak boleh merusak, menurunkan daya dukung lingkungan dan ekosistem;
5) Pembangunan harus mendorong tumbuh berkembangnya swasta dan tidak justru mematikan usaha yang sudah berjalan

STANDAR
1) Standar Nomenklatur Program dan Kegiatan
2) Standar Pendanaan <ul style="list-style-type: none">o Identifikasi sumber pembiayaan yang berasal dari swasta, KPS, BUMN/BUMD, serta APBN/APBD sesuai dengan kewenangannyao Dalam rangka percepatan kegiatan/proyek dimungkinkan langsung dilaksanakan BUMN
3) Standar Pemanfaatan : telaah keterkaitan kegiatan yang diusulkan dengan dampak bagi pencapaian sasaran pembangunan
4) Standar Kesiapan Pelaksanaan Kegiatan, a.l. : <ul style="list-style-type: none">o Kesiapan Dokumen Detail Engineering Design (DED)o Kesiapan Lahan

2. PENAJAMAN TARGET DAN KEBUTUHAN PENDANAAN

- Identifikasi target dan alokasi tahun 2016
- Identifikasi target dan kebutuhan alokasi tahun 2017 (termasuk *forward estimates* nya)

3. MEMBERIKAN CATATAN PEMBAHASAN, JIKA TERDAPAT :

- Ketidaksesuaian dengan Norma dan Standar misal jika telah merupakan kewenangan daerah maka diusulkan untuk dialihkan pada DAK
- Terdapat potensi efisiensi dari pagu APBN 2016, contoh adanya kegiatan yang telah selesai atau terdapat penilaian kapasitas pelaksanaan
- Adanya usulan tambahan pendanaan yang mendesak diluar kegiatan prioritas hasil *Multilateral* (kegiatan, sasaran, target dan kebutuhan pendanaan) serta
- Hal – hal yang penting dan mendesak untuk didanai (contoh: Asian Games, 100 prioritas Presiden dan lainnya)

URUTAN KERJA PEMBAHASAN KEGIATAN DILUAR PRIORITAS NASIONAL

1. VERIFIKASI NORMA DAN STANDAR

NORMA

- 1) Pembangunan bersifat holistik komprehensif memperhatikan seluruh dimensi terkait;
- 2) Pembangunan untuk manusia dan masyarakat, harus memberdayakan masyarakat untuk menjadi mandiri dan tidak justru menyebabkan menjadi masyarakat yang lemah (*entitled society*);
- 3) Pembangunan tidak menciptakan ketimpangan yang makin melebar;
- 4) Pembangunan tidak boleh merusak, menurunkan daya dukung lingkungan dan ekosistem;
- 5) Pembangunan harus mendorong tumbuh berkembangnya swasta dan tidak justru mematikan usaha yang sudah berjalan

STANDAR

- 1) Standar Nomenklatur Program dan Kegiatan
- 2) Standar Pendanaan
 - Identifikasi sumber pembiayaan yang berasal dari swasta, KPS, BUMN/BUMD, serta APBN/APBD sesuai dengan kewenangannya
 - Dalam rangka percepatan kegiatan/proyek dimungkinkan langsung dilaksanakan BUMN
- 3) Standar Pemanfaatan :
 - Catatan umum pendanaan program
 - Untuk kegiatan diluar prioritas yang menjadi bagian program prioritas juga ditelaah secara umum

- Verifikasi kesesuaian Norma dilakukan pada kegiatan diluar prioritas tersebut, jika sebuah program hanya terdiri dari kegiatan diluar prioritas, maka verifikasi dilakukan pada tingkat program

2. DAPAT MENGGUNAKAN SASARAN DAN INDIKATOR YANG TELAH ADA

3. MEMBERIKAN CATATAN PEMBAHASAN, JIKA TERDAPAT :

- Program/kegiatan yang tidak sesuai dengan norma untuk kemudian diusulkan untuk berlanjut atau tidak lanjut
- Ada kebutuhan mendesak lainnya
- Hal lainnya yang dianggap perlu

CONTOH

Badan Standardisasi Nasional

Program/Kegiatan	Sasaran Program	Indikator Kinerja Program	Target		Alokasi (Rp. Miliar)	
			2016	2017	2016	2017
Program Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya BSN	Tercapainya pengelolaan dan pengendalian anggaran yang akuntabel, SDM yang profesional, dan organisasi yang efektif	Opini BPK atas Laporan Keuangan	WTP			
		Penilaian PMPRB	80			
		Penyelesaian reorganisasi BSN	100			
		Nilai LAKIP	74			
		Nilai kepatuhan layanan publik	865			
		Persentase SDM yang sesuai kebutuhan organisasi	100			
Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur BSN	Tercapainya pengelolaan dan pengendalian anggaran yang akuntabel, SDM yang profesional, dan organisasi yang efektif	Persentase penyediaan sarana dan prasarana perkantoran sesuai kebutuhan	80%			
Program Pengembangan Standardisasi Nasional	Meningkatnya jumlah SNI yang memenuhi kebutuhan pemangku kepentingan	Persentase PT/SPT yang telah memenuhi ketentuan pedoman standardisasi nasional	40%			
		Meningkatnya penerapan standar dan akreditasi	Jumlah industri/organisasi yang mendapat fasilitasi penerapan standar/SNI	472 industri		
	Tersedianya peraturan perundang-undangan di bidang standardisasi dan penilaian kesesuaian	Jumlah dokumen peraturan perundang-undangan di bidang standardisasi dan penilaian kesesuaian	8 dokumen			
		Melindungi keselamatan, keamanan, kesehatan masyarakat, pelestarian fungsi lingkungan hidup	Tingkat persepsi terhadap keamanan dan keselamatan produk bertanda SNI	7		
	Meningkatkan daya saing produk nasional di pasar domestik	Tingkat persepsi publik terhadap daya saing produk bertanda SNI di pasar domestik	7			
		Meningkatkan akses produk nasional ke pasar global	Tingkat persepsi terhadap daya saing penerap standar di pasar global	7		
	Meningkatnya Budaya Mutu melalui peningkatan sistem informasi dan edukasi di bidang Standardisasi dan Penilaian Kesesuaian		Meningkatnya Budaya Mutu melalui peningkatan sistem informasi dan edukasi di bidang Standardisasi dan Penilaian Kesesuaian	7		
		Tingkat persepsi publik terhadap layanan jasa standardisasi dan penilaian kesesuaian	7			

PENUTUP

- Fokus pembahasan pada prioritas nasional, untuk Program/Kegiatan lainnya menggunakan koridor Norma dan Standar Perencanaan
 - Kegiatan prioritas dilakukan pembahasan dengan mendalam
 - Program/kegiatan lainnya dilakukan hanya dengan koridor tertentu (verifikasi norma dan standar dengan penjelasan yang diperlukan)
- Implementasi “*Money Follow Program*” alokasi diarahkan pada Program Prioritas (berikut Kegiatan Prioritas)
- Untuk kegiatan yang mendesak namun diluar pembahasan *Multilateral* dapat diajukan melalui catatan pembahasan

TERIMA KASIH